



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 59 Seri G);
20. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 31 Seri G);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

## Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 4 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 31 Seri G) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD serta penyusunan RKA SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA SKPKD).
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Regional berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Regional berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 5 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



ADHY CAHYA INDRA B, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19820215 201001 1 017

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Standar Harga Satuan Regional dalam Peraturan Presiden yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor; dan
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.

Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

**I. SATUAN BIAYA HONORARIUM**

Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada Pejabat Negara, PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

## 1.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara

### 1.1.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas Eksternal

Honorarium narasumber atau pembahas eksternal diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Narasumber atau pembahas eksternal berasal dari:

- 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, kalangan akademisi, TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, Kementrian/Lembaga, Instansi Vertikal) berhak memperoleh honorarium narasumber; atau
- 2) Aparatur Sipil Negara yang memberikan materi diluar tugas dan fungsi, maka berhak memperoleh honorarium narasumber tersebut;
- 3) Honorarium eksternal dapat diberikan honorarium sebesar 100% (seratus persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

### 1.1.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

### 1.1.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat dan peserta kegiatan minimal 70 (tujuh puluh) orang.

## 1.2. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

### 1.2.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

### 1.2.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Untuk pemberian honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## 1.3. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1  
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.1	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA		
	1.1.1. Honorarium Narasumber/Pembahas Eksternal		
	➤ Honorarium Narasumber Eksternal (100%)		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp. 1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetaraka	OJ	Rp. 750.000
	b. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp. 650.000
	1.1.2. Honorarium Moderator	OK	Rp. 700.000
	1.1.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 400.000
1.2.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.2.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp. 350.000
	1.2.2. Honorarium Beracara	OK	Rp. 350.000
1.3.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.3.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp. 3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp. 3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp. 2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp. 1.300.000
	1.3.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp. 1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp. 900.000
	c. Anggota	OB	Rp. 600.000

## II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detaseing);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II

## 1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

### 1. Uang harian pendidikan dan pelatihan

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah sebagai berikut :

<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
ACEH	OH	Rp. 110.000
SUMATERA UTARA	OH	Rp. 110.000
RIAU	OH	Rp. 110.000
KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 110.000
JAMBI	OH	Rp. 110.000
SUMATERA BARAT	OH	Rp. 110.000
SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 110.000
LAMPUNG	OH	Rp. 110.000
BENGKULU	OH	Rp. 110.000
BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 120.000
BANTEN	OH	Rp. 110.000
JAWA BARAT	OH	Rp. 130.000
D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 160.000
JAWA TENGAH	OH	Rp. 110.000
D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 130.000
JAWA TIMUR	OH	Rp. 120.000
BALI	OH	Rp. 140.000
NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 130.000
NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 130.000
KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 110.000
KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 110.000
KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 110.000
KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 130.000
KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 130.000
SULAWESI UTARA	OH	Rp. 110.000
GORONTALO	OH	Rp. 110.000
SULAWESI BARAT	OH	Rp. 120.000
SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 130.000
SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 110.000
SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 110.000
MALUKU	OH	Rp. 110.000
MALUKU UTARA	OH	Rp. 130.000
PAPUA	OH	Rp. 170.000
PAPUA BARAT	OH	Rp. 140.000

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Dalam Wilayah Kabupaten dan Luar Wilayah Kabupaten.

Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

a. Dalam Wilayah Kabupaten

Perjalanan dinas wilayah kabupaten diberlakukan bagi:

1. Eselon III/Eselon IV/Pejabat Fungsional/Korwil yang tidak mendapatkan kendaraan operasional;
2. Staf atau Non ASN.

Adapun ketentuan dari pelaksanaan Perjalanan dinas wilayah kabupaten untuk bantuan transportasi lokal yaitu:

- a) Perjalanan dinas wilayah kabupaten kurang/lebih dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang bantuan transportasi lokal. Besaran bantuan transport lokal wilayah Kabupaten Probolinggo Rp. 100.000,- (tidak menggunakan kendaraan dinas), termasuk juga dipergunakan untuk bantuan transport lokal kepada masyarakat yang menghadiri undangan Pemerintah Daerah;
- b) Bagi Pejabat yang kondisi kendaraan dinasnya mengalami rusak berat, apabila melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Probolinggo maka mendapatkan uang bantuan transportasi lokal dengan ketentuan wajib untuk mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan membuktikan surat pengembalian kendaraan dan surat Berita Acara dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, serta tidak mendapatkan biaya bahan bakar minyak (BBM);
- c) Untuk Eselon III/Eselon IV/Jabatan Fungsional/Korwil yang tidak mendapatkan kendaraan dinas operasional, maka hanya mendapatkan uang bantuan transportasi lokal;
- d) Bagi Eselon III/Eselon IV/Jabatan Fungsional/Korwil/Staf/Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Probolinggo harus melampirkan undangan, bukti foto bertugas (datang dan pulang) yang berbasis google, serta membuat kertas kerja kunjungan/Laporan Kegiatan;

- e) Bagi Eselon III/Eselon IV/Jabatan Fungsional/Korwil/Staf/Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas wilayah kabupaten mengikuti kendaraan dinas pimpinan/pejabat/kendaraan dinas plat merah, maka tidak diperkenankan mendapatkan uang bantuan transportasi lokal.

b. Luar Daerah

Perjalanan dinas jabatan luar daerah terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang representasi Perjalanan Dinas

NO	KOTA/KAB/PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BESARAN/HARI
1	ACEH	OH	Rp. 360.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000
3	RIAU	OH	Rp. 370.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000
5	JAMBI	OH	Rp. 370.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000
8	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000
9	BENGKULU	OH	Rp. 380.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000
11	BANTEN	OH	Rp. 370.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000
13	JAKARTA	OH	Rp. 530.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000
15	JOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000
16	JAWA TIMUR:		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Pejabat Eselon IIa	OH	Rp. 410.000
	b. Pejabat Eselon IIb	OH	Rp. 400.000
	c. Pejabat Eselon IIIa	OH	Rp. 350.000
	d. Pejabat Eselon IIIb/JF disetarakan	OH	Rp. 325.000
	e. Pejabat Eselon IVa/JF disetarakan	OH	Rp. 300.000
	f. Pejabat Eselon IVb	OH	Rp. 275.000
	g. PNS Golongan IV	OH	Rp. 260.000
	h. PNS Golongan III/PPPK Golongan X-XI	OH	Rp. 250.000
	i. PNS Golongan II & I/PPPK Golongan VII-IX	OH	Rp. 225.000
	j. Non ASN/Pihak Lainnya	OH	Rp. 200.000
17	BALI	OH	Rp. 480.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000

21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000
26	GORONTALO	OH	Rp. 370.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000
31	MALUKU	OH	Rp. 380.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000
33	PAPUA	OH	Rp. 580.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000

c. Luar Negeri

Mengikuti ketentuan belanja perjalanan dinas luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2.

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.0000	Rp. 125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp. 200.0000	Rp. 100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.0000	Rp. 75.000

## 2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.3

TABEL 1.3

## SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp. 4.420.000	Rp. 3.526.000	Rp. 1.294.000	Rp. 556.000	Rp. 556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 4.960.000	Rp. 1.518.000	Rp. 1.100.000	Rp. 530.000	Rp. 530.000
3.	RIAU	OH	Rp. 3.820.000	Rp. 3.119.000	Rp. 1.650.000	Rp. 852.000	Rp. 852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 4.275.000	Rp. 1.854.000	Rp. 1.037.000	Rp. 792.000	Rp. 792.000
5.	JAMBI	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 3.337.000	Rp. 1.212.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 5.236.000	Rp. 3.332.000	Rp. 1.353.000	Rp. 650.000	Rp. 650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 5.850.000	Rp. 3.083.000	Rp. 1.571.000	Rp. 861.000	Rp. 861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 4.491.000	Rp. 2.067.000	Rp. 1.140.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp. 2.071.000	Rp. 1.628.000	Rp. 1.546.000	Rp. 630.000	Rp. 630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 3.827.000	Rp. 2.838.000	Rp. 1.957.000	Rp. 622.000	Rp. 622.000
11.	BANTEN	OH	Rp. 5.725.000	Rp. 2.373.000	Rp. 1.000.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp. 5.381.000	Rp. 2.755.000	Rp. 1.006.000	Rp. 570.000	Rp. 570.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 5.850.000	Rp. 1.490.000	Rp. 992.000	Rp. 730.000	Rp. 730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 4.242.000	Rp. 1.480.000	Rp. 954.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp. 5.017.000	Rp. 2.695.000	Rp. 1.384.000	Rp. 845.000	Rp. 845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 4.400.000	Rp. 1.605.000	Rp. 1.076.000	Rp. 664.000	Rp. 664.000
17.	BALI	OH	Rp. 4.890.000	Rp. 1.946.000	Rp. 990.000	Rp. 910.000	Rp. 910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 3.500.000	Rp. 2.648.000	Rp. 1.418.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 3.000.000	Rp. 1.493.000	Rp. 1.355.000	Rp. 550.000	Rp. 550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 2.654.000	Rp. 1.538.000	Rp. 1.125.000	Rp. 538.000	Rp. 538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 4.901.000	Rp. 3.391.000	Rp. 1.160.000	Rp. 659.000	Rp. 659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 4.797.000	Rp. 3.316.000	Rp. 1.500.000	Rp. 540.000	Rp. 540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.188.000	Rp. 1.507.000	Rp. 804.000	Rp. 804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.188.000	Rp. 1.507.000	Rp. 804.000	Rp. 804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 4.919.000	Rp. 2.290.000	Rp. 924.000	Rp. 782.000	Rp. 782.000

26.	GORONTALO	OH	Rp. 4.168.000	Rp. 2.549.000	Rp. 1.431.000	Rp. 764.000	Rp. 764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 4.076.000	Rp. 2.581.000	Rp. 1.075.000	Rp. 704.000	Rp. 704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 4.820.000	Rp. 1.550.000	Rp. 1.020.000	Rp. 732.000	Rp. 732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 2.309.000	Rp. 2.027.000	Rp. 1.567.000	Rp. 951.000	Rp. 951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 2.475.000	Rp. 2.059.000	Rp. 1.297.000	Rp. 786.000	Rp. 786.000
31.	MALUKU	OH	Rp. 3.467.000	Rp. 3.240.000	Rp. 1.048.000	Rp. 667.000	Rp. 667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 3.440.000	Rp. 3.175.000	Rp. 1.073.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000
33.	PAPUA	OH	Rp. 3.859.000	Rp. 3.318.000	Rp. 2.521.000	Rp. 829.000	Rp. 829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 3.872.000	Rp. 3.212.000	Rp. 2.056.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000

Catatan :

- a. Pejabat Eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
- b. Pejabat Eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
- c. Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan atau pendamping DPRD dapat menggunakan hotel yang sama dengan catatan menggunakan tarif yang paling bawah.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan.

\* *Catatan : 30% berdasarkan tarif hotel daerah setempat beserta gradenya*

### III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

#### 3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

##### a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.4, dan Tabel 1.5

**TABEL 1.4**  
**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT**  
**KEPALA DAERAH ATAU ESELON I**

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp. 346.000	Rp.403.000	Rp. 1.075.000	Rp. 749.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp. 276.000	Rp. 365.000	Rp. 800.000	Rp. 641.000
3.	RIAU	OP	Rp. 225.000	Rp. 335.000	Rp. 690.000	Rp. 560.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp. 230.000	Rp. 360.000	Rp. 790.000	Rp. 590.000
5.	JAMBI	OP	Rp. 271.000	Rp. 364.000	Rp. 1.008.000	Rp. 635.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp. 245.000	Rp. 310.000	Rp. 987.000	Rp. 555.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp. 268.000	Rp. 384.000	Rp. 860.000	Rp. 652.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp. 261.000	Rp. 373.000	Rp. 836.000	Rp. 634.000
9.	BENGGULU	OP	Rp. 250.000	Rp. 373.000	Rp. 973.000	Rp. 623.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp. 305.000	Rp. 400.000	Rp. 925.000	Rp. 705.000
11.	BANTEN	OP	Rp. 395.000	Rp. 468.000	Rp. 919.000	Rp. 863.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp. 426.000	Rp. 530.000	Rp. 1.110.000	Rp. 956.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	Rp. 433.000	Rp. 510.000	Rp. 1.216.000	Rp. 943.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp. 232.000	Rp. 309.000	Rp. 749.000	Rp. 541.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp. 250.000	Rp. 405.000	Rp. 963.000	Rp. 655.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp. 357.000	Rp. 406.000	Rp. 1.784.000	Rp. 763.000
17.	BALI	OP	Rp. 375.000	Rp. 490.000	Rp. 1.500.000	Rp. 865.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp. 368.000	Rp. 530.000	Rp. 1.001.000	Rp. 898.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 308.000	Rp. 388.000	Rp. 1.088.000	Rp. 696.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp. 337.000	Rp. 400.000	Rp. 810.000	Rp. 737.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp. 317.000	Rp. 487.000	Rp. 1.267.000	Rp. 804.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 264.000	Rp. 360.000	Rp. 930.000	Rp. 624.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp. 274.000	Rp. 365.000	Rp. 863.000	Rp. 639.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 274.000	Rp. 350.000	Rp. 848.000	Rp. 624.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp. 273.000	Rp. 350.000	Rp. 870.000	Rp. 623.000
26.	GORONTALO	OP	Rp. 215.000	Rp. 393.000	Rp. 1.338.000	Rp. 608.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp. 264.000	Rp. 382.000	Rp. 856.000	Rp. 646.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp. 290.000	Rp. 410.000	Rp. 1.574.000	Rp. 700.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp. 283.000	Rp. 389.000	Rp. 1.013.000	Rp. 672.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp. 237.000	Rp. 350.000	Rp. 800.000	Rp. 587.000
31.	MALUKU	OP	Rp. 306.000	Rp. 454.000	Rp. 1.300.000	Rp. 760.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp. 316.000	Rp. 498.000	Rp. 850.000	Rp. 814.000
33.	PAPUA	OP	Rp. 318.000	Rp. 536.000	Rp. 1.863.000	Rp. 854.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp. 292.000	Rp. 526.000	Rp. 1.752.000	Rp. 818.000

**TABEL 1.5**  
**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II**

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp. 300.000	Rp. 330.000	Rp. 772.000	Rp. 630.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp. 178.000	Rp. 275.000	Rp. 746.000	Rp. 453.000
3.	RIAU	OP	Rp. 185.000	Rp. 245.000	Rp. 591.000	Rp. 430.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp. 227.000	Rp. 273.000	Rp. 625.000	Rp. 500.000

5.	JAMBI	OP	Rp. 215.000	Rp. 301.000	Rp. 840.000	Rp. 516.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp. 173.000	Rp. 240.000	Rp. 663.000	Rp. 413.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp. 218.000	Rp. 293.000	Rp. 745.000	Rp. 511.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp. 216.000	Rp. 270.000	Rp. 640.000	Rp. 486.000
9.	BENGGKULU	OP	Rp. 214.000	Rp. 284.000	Rp. 912.000	Rp. 498.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp. 299.000	Rp. 385.000	Rp. 804.000	Rp. 684.000
11.	BANTEN	OP	Rp. 275.000	Rp. 354.000	Rp. 837.000	Rp. 629.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp. 331.000	Rp. 398.000	Rp. 822.000	Rp. 729.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	Rp. 354.000	Rp. 433.000	Rp. 1.197.000	Rp. 787.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp. 191.000	Rp. 263.000	Rp. 675.000	Rp. 454.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp. 210.000	Rp. 310.000	Rp. 750.000	Rp. 520.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp. 338.000	Rp. 395.000	Rp. 1.352.000	Rp. 733.000
17.	BALI	OP	Rp. 330.000	Rp. 441.000	Rp. 1.182.000	Rp. 771.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp. 280.000	Rp. 420.000	Rp. 764.000	Rp. 700.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 271.000	Rp. 377.000	Rp. 825.000	Rp. 648.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp. 250.000	Rp. 331.000	Rp. 664.000	Rp. 581.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp. 242.000	Rp. 340.000	Rp. 1.031.000	Rp. 582.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 194.000	Rp. 295.000	Rp. 734.000	Rp. 489.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp. 207.000	Rp. 302.000	Rp. 750.000	Rp. 509.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 207.000	Rp. 302.000	Rp. 750.000	Rp. 509.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp. 185.000	Rp. 270.000	Rp. 737.000	Rp. 455.000
26.	GORONTALO	OP	Rp. 175.000	Rp. 250.000	Rp. 1.299.000	Rp. 425.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp. 235.000	Rp. 323.000	Rp. 792.000	Rp. 558.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp. 206.000	Rp. 320.000	Rp. 1.127.000	Rp. 526.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp. 234.000	Rp. 385.000	Rp. 738.000	Rp. 619.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp. 195.000	Rp. 295.000	Rp. 688.000	Rp. 490.000
31.	MALUKU	OP	Rp. 253.000	Rp. 346.000	Rp. 724.000	Rp. 599.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp. 169.000	Rp. 354.000	Rp. 669.000	Rp. 523.000
33.	PAPUA	OP	Rp. 293.000	Rp. 478.000	Rp. 990.000	Rp. 771.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp. 284.000	Rp. 421.000	Rp. 1.120.000	Rp. 705.000

### 3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.6

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.6

## UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
3.	RIAU	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 85.000	Rp. 130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
5.	JAMBI	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
9.	BENGGKULU	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
11.	BANTEN	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Rp. 130.000	Rp. 180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
17.	BALI	OH	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 115.000	Rp. 160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
26.	GORONTALO	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
31.	MALUKU	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
33.	PAPUA	OH	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 140.000	Rp. 200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 115.000	Rp. 160.000

## IV. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembeli anguna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.7, Tabel 1.8, Tabel 1.9, dan Tabel 1.10

TABEL 1.7  
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit	Rp. 702.970.000
2	Wakil Kepala Daerah/Wakil Ketua DPRD	Unit	Rp. 700.000.000
3	Pejabat Eselon I	Unit	Rp. 702.970.000
4	Pejabat Eselon II	Unit	Rp. 472.468.000

TABEL 1.8  
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JAWA TIMUR	Unit	Rp. 212.608.000	Rp. 313.761.000	Rp. 468.830.000

TABEL 1.9  
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp. 360.942.000
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp. 718.252.000
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp. 1.184.787.000

TABEL 1.10

## KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAWA TIMUR	Unit	Rp. 30.767.000	Rp. 38.702.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajar

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS  
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
  2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
  4. Satuan biaya pemeliharaan
1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL  
Pemberian Honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desemiasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya Honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.000.000
1.2	Honorarium Moderator	OK	Rp. 750.000
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 500.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

## 2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2

TABEL 2.2  
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp. 13.285.000	Rp. 7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp. 7.412.000	Rp. 3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp. 7.519.000	Rp. 4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp. 2.407.000	Rp. 1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp. 5.252.000	Rp. 2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp. 4.867.000	Rp. 2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp. 4.364.000	Rp. 2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp. 14.065.000	Rp. 7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp. 5.305.000	Rp. 3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp. 7.231.000	Rp. 3.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp. 4.065.000	Rp. 2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp. 14.568.000	Rp. 8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp. 4.107.000	Rp. 2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp. 7.658.000	Rp. 4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp. 9.413.000	Rp. 5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp. 7.444.000	Rp. 3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp. 4.599.000	Rp. 2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp. 7.295.000	Rp. 4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp. 10.824.000	Rp. 5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp. 16.226.000	Rp. 10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp. 5.316.000	Rp. 3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp. 7.252.000	Rp. 3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp. 5.530.000	Rp. 2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp. 4.984.000	Rp. 2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp. 3.861.000	Rp. 2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp. 9.348.000	Rp. 5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp. 3.412.000	Rp. 2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp. 5.583.000	Rp. 3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp. 4.353.000	Rp. 2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp. 3.861.000	Rp. 2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp. 3.861.000	Rp. 2.342.000

32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp. 5.466.000	Rp. 2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp. 10.001.000	Rp. 6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp. 13.830.000	Rp. 7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	Rp. 8.054.000	Rp. 4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp. 7.434.000	Rp. 4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	Rp. 4.824.000	Rp. 2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp. 6.022.000	Rp. 3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp. 5.177.000	Rp. 3.027.000
40.	AMBON	PALU	Rp. 6.140.000	Rp. 3.508.000
41.	AMBON	SORONG	Rp. 3.637.000	Rp. 2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	Rp. 8.803.000	Rp. 4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	Rp. 4.022.000	Rp. 2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp. 12.739.000	Rp. 6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp. 10.354.000	Rp. 5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp. 10.739.000	Rp. 5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp. 19.071.000	Rp. 10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp. 9.669.000	Rp. 4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp. 12.664.000	Rp. 6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp. 15.702.000	Rp. 7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp. 12.493.000	Rp. 6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp. 10.942.000	Rp. 5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp. 9.445.000	Rp. 4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp. 10.996.000	Rp. 54.230.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp. 9.445.000	Rp. 4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp. 9.445.000	Rp. 4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp. 10.899.000	Rp. 5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp. 18.408.000	Rp. 9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp. 10.835.000	Rp. 6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp. 19.167.000	Rp. 10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp. 9.765.000	Rp. 5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp. 12.760.000	Rp. 6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp. 15.798.000	Rp. 7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp. 9.990.000	Rp. 5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp. 9.530.000	Rp. 5.303.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp. 9.530.000	Rp. 5.305.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp. 10.985.000	Rp. 5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp. 18.504.000	Rp. 10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp. 8.129.000	Rp. 4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp. 8.225.000	Rp. 4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp. 6.193.000	Rp. 3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp. 5.840.000	Rp. 3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp. 14.119.000	Rp. 7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp. 6.236.000	Rp. 3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp. 14.568.000	Rp. 8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp. 5.155.000	Rp. 2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp. 8.354.000	Rp. 4.482.000

78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp. 8.161.000	Rp. 4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp. 5.594.000	Rp. 3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp. 11.199.000	Rp. 5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp. 6.246.000	Rp. 3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp. 7.979.000	Rp. 4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp. 6.439.000	Rp. 3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp. 5.947.000	Rp. 3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp. 4.931.000	Rp. 2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp. 6.482.000	Rp. 3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp. 5.380.000	Rp. 3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp. 4.931.000	Rp. 2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp. 4.931.000	Rp. 2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp. 6.386.000	Rp. 3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp. 13.905.000	Rp. 7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	Rp. 6.289.000	Rp. 3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp. 5.626.000	Rp. 3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp. 2.064.000	Rp. 2.941.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp. 5.006.000	Rp. 2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp. 3.369.000	Rp. 2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp. 6.129.000	Rp. 3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp. 4.385.000	Rp. 2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp. 4.599.000	Rp. 2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp. 6.525.000	Rp. 3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp. 3.027.000	Rp. 1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp. 3.647.000	Rp. 2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp. 4.824.000	Rp. 2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp. 4.439.000	Rp. 2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp. 10.792.000	Rp. 6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp. 8.407.000	Rp. 4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp. 16.686.000	Rp. 8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp. 8.792.000	Rp. 4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp. 17.135.000	Rp. 9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp. 7.723.000	Rp. 4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp. 10.546.000	Rp. 5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp. 9.006.000	Rp. 4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp. 7.498.000	Rp. 4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp. 9.049.000	Rp. 4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp. 7.498.000	Rp. 3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp. 7.498.000	Rp. 4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp. 8.942.000	Rp. 4.285.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp. 16.472.000	Rp. 8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp. 10.439.000	Rp. 5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp. 8.450.000	Rp. 4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp. 16.782.000	Rp. 9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp. 7.370.000	Rp. 3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp. 10.375.000	Rp. 5.337.000

124.	BATAM	MANADO	Rp. 13.413.000	Rp. 6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp. 10.193.000	Rp. 5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp. 8.653.000	Rp. 4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp. 7.145.000	Rp. 3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp. 8.707.000	Rp. 4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp. 7.594.000	Rp. 4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp. 7.145.000	Rp. 3.961.000
131.	BATAM	SOLO	Rp. 7.145.000	Rp. 4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp. 8.600.000	Rp. 4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp. 16.119.000	Rp. 8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp. 2.899.000	Rp. 1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp. 18.622.000	Rp. 9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp. 18.718.000	Rp. 10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp. 16.333.000	Rp. 8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp. 16.729.000	Rp. 8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp. 3.615.000	Rp. 2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp. 15.648.000	Rp. 8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp. 11.734.000	Rp. 6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp. 18.472.000	Rp. 9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp. 16.932.000	Rp. 8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp. 15.424.000	Rp. 8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp. 16.985.000	Rp. 8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp. 15.873.000	Rp. 8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp. 12.782.000	Rp. 7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp. 5.808.000	Rp. 3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp. 11.680.000	Rp. 6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp. 5.091.000	Rp. 2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp. 4.182.000	Rp. 2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp. 7.851.000	Rp. 4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp. 1.840.000	Rp. 1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp. 10.589.000	Rp. 6.568.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp. 9.049.000	Rp. 4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp. 8.557.000	Rp. 4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp. 7.541.000	Rp. 4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp. 9.092.000	Rp. 4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp. 7.990.000	Rp. 4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp. 10.140.000	Rp. 6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp. 7.733.000	Rp. 4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp. 7.690.000	Rp. 4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp. 7.733.000	Rp. 4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp. 6.530.000	Rp. 3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp. 11.434.000	Rp. 6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp. 9.659.000	Rp. 4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp. 7.091.000	Rp. 3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp. 12.707.000	Rp. 6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp. 7.444.000	Rp. 4.193.000

170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp. 6.878.000	Rp. 4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp. 6.428.000	Rp. 3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp. 6.428.000	Rp. 3.615.000
173.	JAYAPURA	SURABAYA	Rp. 7.883.000	Rp. 3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp. 13.274.000	Rp. 7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp. 22.109.000	Rp. 11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp. 18.932.000	Rp. 10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp. 17.381.000	Rp. 9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp. 15.873.000	Rp. 8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp. 17.435.000	Rp. 9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp. 16.322.000	Rp. 9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp. 3.615.000	Rp. 2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp. 3.861.000	Rp. 2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp. 6.525.000	Rp. 3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp. 10.536.000	Rp. 5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp. 9.519.000	Rp. 4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp. 7.969.000	Rp. 4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp. 6.460.000	Rp. 3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp. 8.022.000	Rp. 4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp. 6.910.000	Rp. 384.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp. 11.894.000	Rp. 7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp. 12.953.000	Rp. 7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp. 10.568.000	Rp. 5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp. 5.455.000	Rp. 3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp. 8.129.000	Rp. 4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp. 11.167.000	Rp. 5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp. 9.659.000	Rp. 5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp. 11.220.000	Rp. 5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp. 9.659.000	Rp. 5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp. 9.659.000	Rp. 5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp. 11.103.000	Rp. 5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp. 18.633.000	Rp. 5.466.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp. 14.386.000	Rp. 8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp. 7.348.000	Rp. 4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp. 7.637.000	Rp. 4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp. 11.648.000	Rp. 6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp. 6.749.000	Rp. 3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp. 8.493.000	Rp. 4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp. 10.193.000	Rp. 5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp. 2.663.000	Rp. 1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp. 5.327.000	Rp. 2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp. 11.723.000	Rp. 6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp. 10.108.000	Rp. 5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp. 10.204.000	Rp. 5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp. 8.161.000	Rp. 4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp. 7.829.000	Rp. 4.311.000

216.	MALANG	BIAK	Rp. 16.087.000	Rp. 8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp. 16.536.000	Rp. 9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp. 10.322.000	Rp. 5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp. 10.129.000	Rp. 5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp. 13.167.000	Rp. 6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp. 9.958.000	Rp. 5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp. 8.418.000	Rp. 4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp. 7.915.000	Rp. 4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp. 6.899.000	Rp. 3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp. 8.461.000	Rp. 4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp. 15.873.999	Rp. 8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp. 15.552.000	Rp. 7.316.000
228.	MANADO	PADANG	Rp. 14.012.000	Rp. 6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp. 12.504.000	Rp. 5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp. 14.055.000	Rp. 6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp. 12.953.000	Rp. 6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp. 12.504.000	Rp. 5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp. 12.504.000	Rp. 5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp. 9.937.000	Rp. 5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp. 16.183.000	Rp. 8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp. 10.750.000	Rp. 5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp. 10.864.000	Rp. 6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp. 8.803.000	Rp. 4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	Rp. 8.461.000	Rp. 4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	Rp. 11.552.000	Rp. 6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp. 13.092.000	Rp. 7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp. 4.417.000	Rp. 2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp. 4.417.000	Rp. 2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp. 8.717.000	Rp. 4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp.10.600.000	Rp. 5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp. 9.060.000	Rp. 4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp. 7.551.000	Rp. 4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp. 9.102.000	Rp. 4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp. 8.001.000	Rp. 4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp. 3.829.000	Rp. 2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp. 3.466.000	Rp. 2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp. 12.514.000	Rp. 6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp. 9.733.000	Rp. 5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp. 9.284.000	Rp. 4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp. 9.284.000	Rp. 4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp. 10.739.000	Rp. 5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp. 18.258.000	Rp. 9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp. 10.947.000	Rp. 5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp. 8.193.000	Rp. 4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp. 7.744.000	Rp. 3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp. 7.744.000	Rp. 4.065.000

262.	PADANG	SURABAYA	Rp. 9.199.000	Rp. 4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp. 16.718.000	Rp. 8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp. 10.546.000	Rp. 6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp. 8.161.000	Rp. 6.022.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp. 7.477.000	Rp. 4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp. 8.557.000	Rp. 4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp. 10.300.000	Rp. 5.312.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp. 8.760.000	Rp. 4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp. 7.252.000	Rp. 4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp. 8.803.000	Rp. 4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp. 7.252.000	Rp. 3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp. 7.252.000	Rp. 4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp. 8.696.000	Rp. 4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp. 9.894.000	Rp. 5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp. 9.499.000	Rp. 4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp. 6.685.000	Rp. 3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp. 6.236.000	Rp. 3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp. 6.236.000	Rp. 3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp. 7.690.000	Rp. 4.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp. 15.210.000	Rp. 8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp. 4.268.000	Rp. 2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp. 1.957.000	Rp. 1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp. 6.878.000	Rp. 3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp. 2.941.000	Rp. 1.915.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp. 2.941.000	Rp. 1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp. 9.038.000	Rp. 4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp. 7.091.000	Rp. 3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp. 6.739.000	Rp. 3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp. 6.065.000	Rp. 3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp. 9.060.000	Rp. 4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp. 12.097.000	Rp. 5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp. 8.888.000	Rp. 4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp. 7.337.000	Rp. 3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp. 5.829.000	Rp. 3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp. 7.391.000	Rp. 3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp. 6.279.000	Rp. 3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp. 5.829.000	Rp. 3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp. 5.829.000	Rp. 3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp. 7.284.000	Rp. 3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp. 8.247.000	Rp. 4.154.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp. 7.797.000	Rp. 3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp. 7.797.000	Rp. 4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp. 9.241.000	Rp. 4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp. 16.771.000	Rp. 8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp. 9.915.000	Rp. 5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp. 6.685.000	Rp. 3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp. 6.685.000	Rp. 3.904.000

309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp. 8.140.000	Rp. 8.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp. 15.659.000	Rp. 8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp. 9.466.000	Rp. 4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp. 9.466.000	Rp. 4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp. 3.198.000	Rp. 1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp. 12.675.000	Rp. 3.433.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp. 5.936.000	Rp. 3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp. 11.295.000	Rp. 6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

## 2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk penyusunan perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

### a. Keberangkatan

1. Dari kantor tempat berkedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun keberangkatan ke tempat tujuan;
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

### b. Kepulangan

1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.3  
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp. 123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp. 94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp.147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp.190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 166.000
13.	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 75.000
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 194.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp. 159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 182.000

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor probolinggo) ke Bandara Juanda Sidoarjo di Surabaya.

2. Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

1. Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan modatran sportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
2. Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
3. Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Probolinggo ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di probolinggo ke Bandara Juanda Surabaya; dan
2. Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, ataukantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

1. Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
2. Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar;dan
3. Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor) di Probolinggo.

Contoh Perhitungan Alokasi Biaya Taksi :

Seorang Pejabat/PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari Probolinggo menuju Jakarta menggunakan Pesawat Terbang, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

- a. Berangkat dari Probolinggo
  1. Menuju ke Bandara Juanda dengan kendaraan dinas (biaya BBM);
  2. Menuju Ke Bandara Juanda (Sidoarjo) dengan biaya transportasi darat dalam wilayah provinsi Jawa Timur (Probolinggo-Sidoarjo) ditambah uang/tarif taksi/angkutan umum (wilayah Jawa Timur) dari terminal Bungurasihke Bandara Juanda;
  3. Biaya Taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta.
- b. Kembali Ke Probolinggo
  1. Biaya Taksi dari tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta.
  2. Menuju Probolinggo dengan dijemput kendaraan dinas (biaya BBM).
  3. Menuju Probolinggo dengan biaya transportasi darat dalam wilayah Provinsi Jawa Timur (Surabaya-Probolinggo) ditambah uang/tarif taksi/angkutan umum (wilayah Jawa Timur) dari Bandara Juanda ke Terminal Bungurasih.
    - Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil);
    - Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

### 2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Untuk perjalanan dinas ke tempat tujuan diluar dari yang tertera pada tabel 2.3 menggunakan satuan biaya yang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pengeluaran secara at cost).

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE  
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	JAWA TIMUR			
1.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp. 225.000
2.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp. 285.000
3.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp. 255.000
4.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp. 225.000
5.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp. 255.000
6.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp. 225.000
7.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp. 261.000
8.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp. 235.000
9.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp. 235.000
10.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp. 225.000
11.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp. 261.000
12.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp. 245.000
13.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp. 253.000
14.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp. 228.000
15.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp. 225.000
16.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp. 245.000
17.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp. 253.000
18.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp. 285.000
19.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp. 243.000
20.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp. 228.000
21.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp. 255.000
22.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp. 228.000
23.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp. 235.000
24.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp. 240.000

25.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp. 255.000
26.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp. 255.000
27.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp. 245.000
28.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp. 245.000
29.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp. 245.000
30.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp. 242.000
31.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp. 255.000
32.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp. 225.000
33.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp. 235.000
34.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp. 245.000
35.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp. 228.000
36.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp. 225.000
37.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp. 228.000

### 3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan snack, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Ketentuan tambahan untuk Satuan Biaya Konsumsi Rapat antara lain:

1. Rapat yang dilaksanakan sampai dengan 4 jam hanya diberikan Snack;
2. Rapat yang dilaksanakan lebih dari 4 jam diberikan Nasi Kotak;
3. Rapat yang dilaksanakan lebih dari 8 jam dapat diberikan Nasi Kotak dan snack;
4. Rapat yang dilaksanakan di Internal SKPD hanya dapat diberikan snack.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5  
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No	Uraian	Satuan	Biaya	
1.	Satuan Biaya Makan Minum Rapat/Kegiatan			
	a. Rapat Biasa - Nasi Kotak	Orang/Kali	Rp. 40.000	
	b. Rapat Biasa - Snack (Kotak)	Orang/Kali	Rp. 20.000	
	c. Prasmanan (makan) VIP	Orang/Kali	Rp. 60.000	
	d. Prasmanan (makan) VVIP	Orang/Kali	Rp. 70.000	
	e. Snack (Kudapan) VVIP	Orang/Kali	Rp. 20.000	
	f. Nasi Tumpeng (20 Orang)	Paket	Rp. 500.000	Berlaku Khusus Kementerian, Gubernur dan DPR RI
	g. Snack (Nampan)	Paket	Rp. 50.000	
2.	Satuan Biaya Makan Dan Minum Lainnya			
	1. Tuna Sosial	Orang/Kali	Rp. 30.000	
	2. Pengamanan unsur Instansi Vertikal	Orang/Kali	Rp. 30.000	
	3. Diklat Struktural dan Non Struktural (Peserta, Panitia dan Widyaiswara)			
	a. Makan dan Minum	OK	Rp. 40.000	
	b. Snack	OK	Rp. 20.000	
	4. Nasi Bungkus	OK	Rp. 15.000	

#### 4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

##### 4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6

## SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JAWA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp. 196.000	Rp. 170.000	Rp. 10.000

## 4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.7, Tabel 2.8, dan Tabel 2.9.

TABEL 2.7

## SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp. 39.000.000
II.	WAKIL BUPATI DAN WAKIL KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp. 38.000.000

III.	KENDARAAN DINAS JABATAN SEKRETARIS DAERAH	Unit/Tahun	Rp. 37.000.000
IV.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL STAF AHLI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PEJABAT SETINGKAT ESELON II (KEPALA PD)	Unit/Tahun	Rp. 22.500.000
V.	KENDARAAN DINAS JABATAN PEJABAT SETINGKAT ESELON III (KEPALA PD DAN CAMAT)	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000

TABEL 2.8

## SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Kendaraan Dinas Operasional Pejabat setingkat Eselon III	Unit/Tahun	Rp. 12.000.000
II.	Kendaraan Ops. Lapangan (Double Gardan)	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000
III.	Kendaraan Roda 4 Operasional	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000
IV.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000
V.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin s/d 250 cc)	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL  
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Bis dan Truck Tangki Air	Unit/Tahun	Rp. 21.000.000
2.	Kendaraan dinas roda 2 dan roda 3	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000
3.	Speedboat/perahu/kapal	Unit/Tahun	Rp. 8.500.000

#### 4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp. 730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp. 690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp. 610.000
5.	Genset lebihkecildari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp.10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp.10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp.13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp.14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp.15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp.16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp.17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp.20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp.22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp.25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp.31.770.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajar

Pj. BUPATI PROBOLINGGO  
ttd  
UGAS IRWANTO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai muatan lokal yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo diluar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dimana merupakan batasan nilai yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

3.1 Belanja Jasa

3.1.1 Belanja Jasa yang diberikan kepada Tenaga Honorer Daerah (Non) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo:

- a. Diangkat dengan Keputusan Bupati;
- b. Diangkat dengan kesepakatan bersama dan Keputusan penetapan Bupati.

Untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan dengan :

- a. Pembayaran biaya untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengakomodir kewajiban Jaminan Kesehatan;
- b. Kenaikan besaran biaya untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan perhitungan masa kerja khusus pegawai tidak tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 4 (empat) tahun sekali terhitung mulai awal pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

3.1.2 Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan latihan prajabatan bagi CPNS sebagai syarat diangkat menjadi PNS. Satuan biaya ini telah termasuk biaya observasi, tapi belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

### 3.1.3 Bantuan Beasiswa dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri

Satuan Biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi PNSD yang melanjutkan pendidikan diploma, tingkat sarjana atau Strata 1 (satu), pasca sarjana atau strata 2 (dua) atau strata 3 (program doctoral). Satuan biaya ini termasuk didalamnya adalah biaya hidup dan operasional, uang saku, dan referensi per tahun.

### 3.1.4 Pelaksanaan Ujian dan Tes Kesehatan

Besaran biaya yang dipergunakan untuk melakukan ujian dan tes Kesehatan yang kemudian dibayarkan kepada Rumah Sakit yang berwenang.

### 3.1.5 Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis

Besaran biaya yang dipergunakan untuk pola kemitraan 3 macam Pendidikan dan pelatihan teknis serta pengiriman peserta Pendidikan dan pelatihan ke Lembaga Penyelenggara Diklat.

### 3.1.6 Satuan Biaya Tenaga Mentor Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi

Satuan Biaya Mentor Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi dapat diberikan kepada PNS yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada PNS atau masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

### 3.1.7 Biaya Fasilitas Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi

Biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo apabila mengirim peserta Diklat ke BKPSDM Provinsi Jatim

### 3.1.8 Sertifikasi Kompetensi, Analisa Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Dampak Diklat

Besaran biaya yang dipergunakan untuk pemenuhan kompetensi jabatan fungsional.

### 3.1.9 Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural

Besaran biaya yang dipergunakan untuk pemenuhan kompetensi Jabatan Fungsional.

### 3.1.10 Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan

Dasar penempatan pada belanja jasa adalah bahwa pemberian dalam satuan biayanya didasarkan atas kontribusi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.

### 3.1.11 Beban Jasa Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup

#### a. Biaya Iuran Tahunan

Laboratorium yang terakreditasi diwajibkan untuk membayar iuran tahunan laboratorium sesuai dengan Lampiran PPRI No. 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional.

#### b. Biaya Uji Profisiensi

Laboratorium yang terakreditasi dan/atau mengajukan akreditasi wajib mengikuti program uji profisiensi dan menyampaikan bukti hasil uji profisiensi yang telah diikuti sebagai bagian dari persyaratan akreditasi. Sesuai dengan Aturan KAN U-08.

#### c. Asesor Asesmen

1. Laboratorium yang terakreditasi diwajibkan untuk membayar Biaya Asesor Asesmen sesuai dengan Lampiran PPRI No. 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional.

2. Pembayaran disesuaikan dengan jumlah asesor dan lama hari pelaksanaan sesmen pada Laboratorium yang melaksanakan asesmen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

#### d. Asesor Witness

1. Laboratorium yang terakreditasi diwajibkan untuk membayar Biaya Asesor Witness sesuai dengan Lampiran PPRI No. 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional.

2. Pembayaran disesuaikan dengan jumlah asesor dan lama hari pelaksanaan sesmen pada Laboratorium yang melaksanakan asesmen witness oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

e. Biaya Permohonan Asesmen

1. Laboratorium yang terakreditasi diwajibkan untuk membayar Biaya Asesmen sesuai dengan Lampiran PPRI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional;
2. Pembayaran Biaya Asesmen dilaksanakan pada saat Laboratorium mengajukan permohonan Asesmen kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN);
3. Pelaksanaan Asesmen atau survelen untuk Laboratorium dijadwalkan sebagai berikut :
  - Survelen pertama dilaksanakan pada bulan ke 15 sampai dengan bulan ke 18 sejak tanggal sertifikat akreditasi;
  - Survelen kedua dilaksanakan pada bulan ke 36 sampai dengan bulan ke 39 sejak tanggal sertifikat akreditasi;
  - Reasesmen dilaksanakan pada bulan ke 51 sampai dengan bulan ke 54 sejak tanggal sertifikat akreditasi;
  - Jarak waktu pelaksanaan surveilen/asesmen dengan kunjungan sebelumnya tidak lebih dari 24 bulan.

3.1.12 Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis/Diklat pada Dinas Lingkungan Hidup

1. Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis/Diklat di berikan untuk Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional ini berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan. Kompetensi di kembangkan melalui Bimbingan Teknis/Diklat karena sesuai dengan persyaratan kompetensi pada jabatan tersebut;
2. Biaya Kontribusi Bimbingan teknis/Diklat ini berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengembangan karir PNS di lakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilain kinerja dan kebutuhan Intansi Pemerintah.

3.1.13 Bimtek penanganan gangguan reproduksi pada Dinas Pertanian.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas puskesmas dalam penanganan gangguan reproduksi ternak.

Satuan biaya belanja jasa pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1  
SATUAN BIAYA BELANJA JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.1	BELANJA JASA		
	3.1.1 Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati		
	a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	OB	Rp. 11.750.000
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi Umum/Apoteker	OB	Rp. 6.100.000
	c. Dokter Paruh Waktu	OB	Rp. 3.750.000
	d. Dokter Resident Senior	OB	Rp. 4.500.000
	e. S I/D IV	OB	Rp. 2.350.000
	f. S I/D IV Kesehatan	OB	Rp. 2.350.000
	g. D III	OB	Rp. 2.325.000
	h. SLTA/D I/DII	OB	Rp. 2.225.000
	i. SD/SLTP	OB	Rp. 2.100.000
	j. Guru Tidak Tetap (GTT) ➤ S I/S II	OB	Rp. 2.000.000
	k. Tenaga Akuntansi (Tenakun) : ➤ S I ➤ D III	OB OB	Rp. 3.100.000 Rp. 2.550.000
	l. Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) ➤ S I/D IV ➤ D III ➤ SLTA/D I/D II ➤ SD/SLTP	OB OB OB OB	Rp. 2.600.000 Rp. 2.550.000 Rp. 2.450.000 Rp. 2.375.000
	m. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati (Non Strata Pendidikan) ➤ Tenaga Lapangan, Tenaga Pengelolaan Pasar dan Juru Parkir ➤ Tenaga Poskesdes ➤ Tenaga Kebersihan (DLH)	OB OB OB	Rp. 1.325.000 Rp. 2.725.000 Rp. 1.675.000
	n. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan Surat Kesepakatan Bersama dan Keputusan Bupati tentang pemberian Honorarium PTT yang diangkat dengan keputusan Ka. OPD		
	1. PTT di Lingkungan Dinas Pendidikan (di lingkungan sekolah) ➤ S I/D IV ➤ D III ➤ SLTA/D I/D II ➤ SD/SLTP	OB OB OB OB	Rp. 1.350.000 Rp. 1.300.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.150.000
	2. PTT di Lingkungan Badan/Dinas/Bagian ➤ S I/D IV ➤ D III ➤ SLTA/D I/D II ➤ SD/SLTP	OB OB OB OB	Rp. 1.500.000 Rp. 1.450.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.350.000

	<p>3. PTT pada Kecamatan dan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ S I/D IV</li> <li>➢ D III</li> <li>➢ SLTA/D I/D II</li> <li>➢ SD/SLTP</li> </ul>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>Rp. 1.300.000</p> <p>Rp. 1.250.000</p> <p>Rp. 1.200.000</p> <p>Rp. 1.150.000</p>
	<p>4. PTT dengan Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Lingkup Dinas Kesehatan (BLUD pada Puskesmas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ S I/D IV</li> <li>➢ D III</li> <li>➢ SLTA/D I/D II</li> <li>➢ SD/SMP</li> <li>➢ Dokter/Dokter Gigi/Apoteker (BLUD)</li> <li>➢ S1 (BOK)</li> <li>➢ D III</li> </ul>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>Rp. 1.000.000</p> <p>Rp. 900.000</p> <p>Rp. 800.000</p> <p>Rp. 700.000</p> <p>Rp. 5.000.000</p> <p>Rp. 2.750.000</p> <p>Rp. 2.700.000</p>
	<p>5. RSUD Waluyo Jati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Apoteker</li> <li>➢ S I/D IV Kesehatan</li> <li>➢ S1 Umum dan D3 Kesehatan</li> <li>➢ D1/D2/D3 Umum</li> <li>➢ SMA/SMK Sederajat</li> </ul>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>Rp. 1.600.000</p> <p>Rp. 1.350.000</p> <p>Rp. 1.200.000</p> <p>Rp. 1.100.000</p> <p>Rp. 1.000.000</p>
	<p>3.1.2 Satuan Biaya Latihan Prajabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ CPNS Golongan II dan III</li> <li>➢ CPNC dari Tenaga Honoror</li> </ul>	<p>Psрта/angk.</p> <p>Psрта/angka.</p>	<p>Rp. 5.260.000</p> <p>Rp. 4.000.000</p>
	<p>3.1.3 Bantuan Beasiswa Dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri</p> <p>1. Program Diploma I, III, dan Diploma IV/ Strata 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Biaya Hidup dan Biaya Operasional</li> <li>➢ Uang Buku dan Referensi</li> <li>➢ Riset (akhir program) s/d s/d</li> <li>penggunaan/penjilidan</li> <li>➢ Bantuan Ijin Belajar</li> </ul>	<p>Pertahun</p> <p>Pertahun</p> <p>Paket</p> <p>O/K</p>	<p>Rp. 12.000.000</p> <p>Rp. 1.000.000</p> <p>Rp. 4.000.000</p> <p>Rp. 1.000.000</p>
	<p>2. Program Strata 2 dan Strata 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Biaya Hidup dan Biaya Operasional</li> <li>➢ Uang Buku dan Referensi</li> <li>➢ Riset (akhir program) s/d penggunaan</li> <li>/penjilidan</li> <li>➢ Bantuan Ijin Belajar</li> </ul>	<p>Pertahun</p> <p>Pertahun</p> <p>Paket</p> <p>O/K</p>	<p>Rp. 15.800.000</p> <p>Rp. 2.500.000</p> <p>Rp. 7.500.000</p> <p>Rp. 1.500.000</p>
	<p>3. Program Dokter Spesialis (Masa Kuliah ± 6 Tahun)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Biaya Hidup dan Biaya Operasional</li> <li>➢ Uang Buku dan Referensi</li> <li>➢ Riset (akhir program) s/d penggunaan</li> <li>/penjilidan</li> </ul>	<p>Pertahun</p> <p>Pertahun</p> <p>Paket</p>	<p>Rp. 16.000.000</p> <p>Rp. 5.000.000</p> <p>Rp. 10.000.000</p>
	<p>3.1.4 Pelaksanaan Ujian dan Tes Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pelaksanaan Uji Kesehatan CPNS</li> <li>➢ Pelaksanaan tes kesehatan dan kejiwaan PNS</li> </ul>	<p>O/kegiatan</p> <p>Paket</p>	<p>Rp. 1.000.000</p> <p>Rp. 1.000.000</p>

3.1.5	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Uji sertifikasi</li> <li>➤ Diklat Bendaharawan dan uji Sertifikasi Bendaharawan Pengeluaran</li> <li>➤ Penyusunan RKA</li> <li>➤ Strategi Inputing SIPD</li> <li>➤ Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja dan Resiko bagi APIP</li> <li>➤ Pola Kemitraan</li> </ul>	OK OK OK OK OK OK	Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 3.200.000 Rp. 3.200.000 Rp. 6.500.000 Rp. 10.000.000
3.1.6	Tenaga Mentor Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II</li> <li>➤ Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)</li> <li>➤ Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP)</li> </ul>	O/K O/K O/K	Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000
3.1.7	Biaya Fasilitasi Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemitraan PKA Kab/Kota</li> <li>➤ Kemitraan PKP Kab/Kota</li> <li>➤ Kemitraan Latsar Kab/Kota</li> </ul>	O/angkatan O/angkatan O/angkatan	Rp. 17.500.000 Rp. 17.500.000 Rp. 10.000.000
3.1.8	Sertifikasi Kompetensi, Analisa Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Dampak Diklat <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fasilitasi Analisa Kebutuhan Diklat</li> <li>➤ Fasilitasi Evaluasi Dampak Diklat</li> </ul>	Angkatan Angkatan	Rp. 17.500.000 Rp. 15.000.000
3.1.9	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diklat Jabatan Fungsional Satpol PP</li> <li>➤ Pelatihan Publikasi Ilmiah dan Ujikom</li> <li>➤ Pelatihan Penguatan yang berasal dari Perpindahan Jabatan (Promosi)</li> <li>➤ Pelatihan Penguatan yang berasal dari Formasi</li> <li>➤ Pola Kemitraan</li> </ul>	O/Pelatihan O/Pelatihan O/Pelatihan  O/Pelatiham O/Pelatihan	Rp. 8.000.000 Rp. 5.450.000 Rp. 2.950.000  Rp. 3.650.000 Rp. 10.000.000
3.1.10	Belanja Jasa Petugas Pendukung Dan Peserta Kegiatan		
	1. Petugas Pendukung Kegiatan (Pramusaji, satpam, dll)	OH	Rp.100.000
	2. Pengamanan Pejabat	OK	Rp. 150.000
	3. Pengawalan Pejabat	OK	Rp. 100.000
	4. Penyiar Radio	OJ	Rp. 10.000
	5. Reporter Radio	O/berita	Rp. 25.000
	6. Editing Suara (Dubber)	O/rekaman	Rp. 75.000
	7. Tenaga Kearsipan	OB	Rp. 200.000
	8. Penguji/Tenaga Ahli (Tingkat Kabupaten)		
	a. Tenaga Analis Data Sektap Penanggulangan Kemiskinan :		
	1. Koordinator (S1)	OB	Rp. 2.500.000
	2. Anggota	OB	Rp. 2.000.000
	b. Tenaga Fasilitator Peti Koin Bermantra	OB	Rp. 2.500.000
	c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	Rp. 1.350.000

	d. Tenaga Teknis Pusdalops Penanggulangan Bencana	OB	Rp. 2.000.000
	e. Petugas Lapangan Pusdalops PB	OB	Rp. 1.300.000
	f. TRC	OB	Rp. 1.300.000
	g. Tenaga Tenatik – administrasi	OB	Rp. 1.750.000
	h. Tenaga Tenatik	OB	Rp. 3.300.000
	i. Tenaga Pendamping Koperasi	OB	Rp. 2.300.000
	j. Pendamping Koperasi	OB	Rp. 500.000
	k. Tim Fasilitator Perencana Pembangunan		
	> Koordinator	OB	Rp. 1.250.000
	> Anggota	OB	Rp. 1.000.000
	l. Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp. 3.000.000
	9. PEMBERIAN HADIAH PEMBINAAN/PENGHARGAAN dalam bentuk uang atas penyelenggaraan kegiatan/lomba		
	1) Tingkat Nasional (Lomba Inovasi)		
	a. Juara 1	O/L	Rp 12.500.000
	b. Juara 2	O/L	Rp 11.500.000
	c. Juara 3	O/L	Rp 10.500.000
	d. Juara Harapan 1	O/L	Rp 9.500.000
	e. Juara Harapan 2	O/L	Rp 8.500.000
	2) Tingkat Nasional (Lomba Ketangkasan)		
	a. Juara 1	O/L	Rp 10.000.000
	b. Juara 2	O/L	Rp 9.500.000
	c. Juara 3	O/L	Rp 9.000.000
	d. Juara Harapan 1	O/L	Rp 8.500.000
	e. Juara Harapan 2	O/L	Rp 8.000.000
	3) Tingkat Provinsi (Lomba Inovasi)		
	a. Juara 1	O/L	Rp 8.500.000
	b. Juara 2	O/L	Rp 7.500.000
	c. Juara 3	O/L	Rp 6.500.000
	d. Juara Harapan 1	O/L	Rp 5.500.000
	e. Juara Harapan 2	O/L	Rp 4.500.000
	4) Tingkat Provinsi (Lomba Ketangkasan)		
	a. Juara 1	O/L	Rp 7.500.000
	b. Juara 2	O/L	Rp 6.500.000
	c. Juara 3	O/L	Rp 5.500.000
	d. Juara Harapan 1	O/L	Rp 4.500.000
	e. Juara Harapan 2	O/L	Rp 3.500.000
	5) Tingkat Kabupaten		
	a. Juara 1	O/L	Rp 5.000.000
	b. Juara 2	O/L	Rp 4.000.000
	c. Juara 3	O/L	Rp 3.000.000
	d. Juara Harapan 1	O/L	Rp 2.750.000
	e. Juara Harapan 2	O/L	Rp 2.500.000
	6) Tingkat Kecamatan		
	a. Juara 1	O/L	Rp 2.500.000
	b. Juara 2	O/L	Rp 2.250.000
	c. Juara 3	O/L	Rp 2.000.000
	d. Juara Harapan 1	O/L	Rp 1.750.000
	e. Juara Harapan 2	O/L	Rp 1.500.000
	7) Biaya Juri		
	a. Dalam Kabupaten	O/H	Rp. 500.000
	b. Luar Kabupaten	O/H	Rp. 1.000.000

	10. TIM FORKOPIMDA a. Ketua b. Anggota	OB OB	Rp 1.500.000 Rp.1.000.000
	11. JASA KETUA RT DAN RW DI KELURAHAN	Orang/Tahun	Rp. 900.000
	12. OPERATOR IPLT, IPAL KOMUNAL, DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL), dan TENAGA Tim Jasa Profesi Ahli (TPA) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN a. Tenaga Operator IPLT b. Tenaga Operator IPAL Komunal c. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Khusus untuk mandor d. Tenaga Fasilitator Lapangan	OH OH 27/OH O/Bulan Per Dokumen	Rp. 80.000 Rp. 80.000 Rp. 115.000 Rp. 3.000.000 Rp. 375.000
	13. Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan a. Metode Klasikal b. Metode Terpadu c. Metode Pembelajaran Jarak Jauh 14. Tenaga Penyusun Naskah Akademik, Penjelasan dan/atau Keterangan 15. Tenaga Ahli Penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah 16. Tenaga Ahli Pendampingan Pembahasan Raperda di DPRD	OK OK OK OJ OJ OJ	Rp 36.252.000 Rp 23.864.000 Rp 14.708.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
	17. Jasa Guru Pendamping Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	O/H	Rp. 250.000
	3.1.11 Beban Jasa Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup a. Biaya Iuran Tahunan b. Biaya Uji Profisiensi c. Asesor witness d. Asesor Asesmen e. Biaya Permohonan Asesmen	Kali Paket O/H O/H Kali	Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 3.500.000 Rp. 5.000.000
	3.1.12 Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis/Diklat pada Dinas Lingkungan Hidup	O/Kali	Rp. 5.000.000
	3.1.13 Bimtek penanganan gangguan reproduksi pada Dinas Pertanian	O/P	Rp. 15.000.000

#### 4. Tabel Hari Konsultasi, Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Study Banding

TABEL 3.2

Tabel Hari Konsultasi, Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Study Banding

Nomor	Uraian	Jumlah Hari
1.	Area I (Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang)	1 hari (tidak menginap)
2.	Area II (Madura Raya, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Pacitan, Jombang, Gresik, Surabaya, Malang Raya, Jember, Mojokerto dan Banyuwangi, Sidoarjo)	2 hari
3.	Area III ( Daerah Selain area I dan Area II) termasuk luar Provinsi	3 hari

Pelaksanaan :

- a. 2 (dua) hari (bermalam 1 kali) diberikan uang harian 2 kali ;
- b. 3 (tiga) hari (bermalam 2 kali) diberikan uang harian 3 kali

Istri/suami Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami/istri maupun dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas sama dengan pejabat yang didampingi tanpa diberikan uang representatif.

Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang jumlah besarnya sebagaimana ketentuan SHS. (sepanjang kendaraan tdk ada/dipakai bersamaan).

#### 1. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo terinci pada Tabel 3.3

TABEL 3.3

#### SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROBOLINGGO

NO	WILAYAH	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROBOLINGGO	OP	Rp. 205.000	Rp. 235.000	Rp. 640.000	Rp. 400.000

## 2. Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kereta api pergi pulang (PP dari stasiun suatu kota ke stasiun kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 3.4

TABEL 3.4  
SATUAN BIAYA TIKET KERETA API PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN HARGA TIKET
	ASAL	TUJUAN	EKSEKUTIF
1	Probolinggo	Surabaya	Rp 320.000
2	Probolinggo	Jember	Rp 320.000
3	Probolinggo	Yogyakarta	Rp 520.000
4	Probolinggo	Banyuwangi	Rp 395.000
5	Surabaya	Jakarta	Rp 815.000
6	Surabaya	Probolinggo	Rp 320.000
7	Yogyakarta	Probolinggo	Rp 425.000
8	Jember	Probolinggo	Rp 320.000
9	Jakarta	Surabaya	Rp 815.000
10	Banyuwangi	Probolinggo	Rp 315.000

## 3. Satuan Biaya Transport Tertentu/Khusus

Satuan biaya Transport tertentu/khusus merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi yang diberikan untuk Transport Ojek Anak Sekolah dan Transport Guru ke P. Gili Ketapang.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 3.5

TABEL 3.5  
SATUAN KLASIFIKASI BIAYA TRANSPORTASI

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Satuan Biaya Transport		
	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	a. Biaya Transport Ojek Anak Sekolah	OH	Rp. 350.000
	b. Biaya Transport Guru ke P.Gili Ketapang	OB	Rp. 200.000

#### 4. Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Negeri Khusus Wilayah Provinsi Jawa Timur

Satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian BBM kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan perjalanan dinas dalam perencanaan anggaran.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri menggunakan *metode at cost* (sesuai pengeluaran), dibuktikan dengan bukti pembelian dari SPBU.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 3.6

TABEL 3.6  
Wilayah Provinsi Jawa Timur

No.	Tempat Tujuan	Dari Probolinggo <sup>1)</sup>		Dari Kraksaan <sup>2)</sup>		Keterangan
		Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	
1.	- Pasuruan	41	12	71	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Biaya BBM diberikan bagi yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas/non dinas dihitung per 1 liter BBM dengan jarak 7 km</li> <li>● Penentuan jarak berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang dituju (tidak PP)</li> <li>● Penentuan BBM berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang di tuju (PP)</li> </ul>
2.	- Lumajang	45	14	75	22	
3.	- Sidoarjo	80	24	110	32	
4.	- Bondowoso	108	30	78	22	
5.	- Malang	90	26	120	34	
6.	- Situbondo	129	38	99	28	
7.	- Batu	98	28	128	38	
8.	- Jember	99	28	99	28	
9.	- Surabaya	105	30	135	38	
10.	- Mojokerto	103	30	133	38	
11.	- Gresik	117	34	147	42	
12.	- Bangkalan	139	40	169	48	
13.	- Jombang	129	38	159	46	
14.	- Lamongan	142	42	172	50	
15.	- Nganjuk	169	48	199	58	
16.	- Blitar	166	48	196	56	
17.	- Sampang	188	54	218	62	
18.	- Banyuwangi	195	56	165	48	
19.	- Kediri	175	50	205	60	
20.	- Tuban	198	58	228	66	
21.	- Tulungagung	209	60	239	64	
22.	- Bojonegoro	207	60	237	68	
23.	- Madiun	217	61	247	70	
24.	- Pamekasan	221	64	251	72	
25.	- Ngawi	230	66	260	74	
26.	- Trenggalek	228	66	258	74	
27.	- Magetan	239	68	269	78	

28.	- Ponorogo	246	70	276	80	
29.	- Sumenep	284	82	314	90	
30.	- Pacitan	324	94	354	102	

5. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Dan Genset  
Satuan biaya BBM kendaraan dinas operasional dan genset yang pembayarannya secara at coast, yang diatur diluar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menjadi muatan lokal Pemerintah Daerah. Penganggaran biaya bahan bakar kendaraan dinas operasional pejabat negara dianggarkan pada belanja program kegiatan di Sekretariat.

TABEL 3.7  
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN GENSET

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Genset		
	a. Kendaraan Dinas Jabatan Bupati/Ketua DPRD	Liter/Unit/Bulan	500
	b. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Liter/Unit/Bulan	400
	c. Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	Liter/Unit/Bulan	300
	d. Kendaraan Dinas Operasional Staf Ahli dan Asisten Sekretariat Daerah	Liter/Unit/ Bulan	200
	e. Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Setingkat Eselon II (Kepala PD)	Liter/Unit/Bulan	200
	f. Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat setingkat Eselon III	Liter/Unit/Bulan	150
	g. Kendaraan Dinas Operasional Pejabat setingkat Eselon II/ Koordinator / Jabatan Fungsional Penyederhanaan Birokrasi	Liter/Unit/Bulan	125
	h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Liter/Unit/Bulan	200
	i. Kendaraan Pelayanan Umum	Liter/Unit/Bulan	200
	j. Kendaraan Roda 2 Pejabat Struktural/Sub Koordinator /Jabatan Fungsional/Korwil Penyederhanaan Birokrasi	Liter/Unit/Bulan	30

	k. Bus Pemerintah Daerah	Liter/Unit/Bulan	350
	l. Truck Tanki Air	Liter/Unit/ Bulan	300
	m. Genset 500 kva	Liter/Tahun	630
	n. Genset 30 kva	Liter/Tahun	90
	o. Genset 10 kva	Liter/Tahun	30
	p. Kendaraan Dinas Operasional Pengangkutan Sampah (Dumptruck / Truck Amroll, Miniloder)	Liter/unit/Bulan	500
	q. Alat Berat Pemrosesan Sampah di TPA (Bulldozer dan Excavator)	Liter/unit/Bulan	1.500

#### 6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor diluar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yaitu berupa AC, yang mana merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai)

TABEL 3.8  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AC Central	unit/Tahun	Rp. 7.200.000
2.	AC Cassette	unit/Tahun	Rp. 3.600.000

#### 7. Satuan Biaya Transportasi Darat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali (One way/Sekali jalan)

TABEL 3.9  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PROVINSI JAWA TIMUR (ONE WAY/SEKALI JALAN)

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	PAJARAKAN	KOTA SURABAYA	ORANG/KALI	211.000,-
2	PAJARAKAN	KABUPATEN BANGKALAN	ORANG/KALI	225.000,-
3	PAJARAKAN	KABUPATEN BANYUWANGI	ORANG/KALI	154.000,-
4	PAJARAKAN	KABUPATEN BLITAR	ORANG/KALI	255.000,-
5	PAJARAKAN	KABUPATEN BOJONEGORO	ORANG/KALI	255.000,-
6	PAJARAKAN	KABUPATEN BONDOWOSO	ORANG/KALI	70.000,-
7	PAJARAKAN	KABUPATEN GRESIK	ORANG/KALI	255.000,-
8	PAJARAKAN	KABUPATEN JEMBER	ORANG/KALI	210.000,-
9	PAJARAKAN	KABUPATEN JOMBANG	ORANG/KALI	219.500,-
10	PAJARAKAN	KABUPATEN KEDIRI	ORANG/KALI	235.000,-
11	PAJARAKAN	KABUPATEN LAMONGAN	ORANG/KALI	255.000,-
12	PAJARAKAN	KABUPATEN LUMAJANG	ORANG/KALI	126.000,-
13	PAJARAKAN	KABUPATEN MADIUN	ORANG/KALI	245.000,-
14	PAJARAKAN	KABUPATEN MAGETAN	ORANG/KALI	253.000,-
15	PAJARAKAN	KABUPATEN MALANG	ORANG/KALI	228.000,-

16	PAJARAKAN	KABUPATEN MOJOKERTO	ORANG/KALI	191.500,-
17	PAJARAKAN	KABUPATEN NGANJUK	ORANG/KALI	245.000,-
18	PAJARAKAN	KABUPATEN NGAWI	ORANG/KALI	253.000,-
19	PAJARAKAN	KABUPATEN PACITAN	ORANG/KALI	285.000,-
20	PAJARAKAN	KABUPATEN PAMEKASAN	ORANG/KALI	243.000,-
21	PAJARAKAN	KABUPATEN PASURUAN	ORANG/KALI	216.500,-
22	PAJARAKAN	KABUPATEN PONOROGO	ORANG/KALI	255.000,-
23	PAJARAKAN	KABUPATEN SAMPANG	ORANG/KALI	235.000,-
24	PAJARAKAN	KABUPATEN SIDOARJO	ORANG/KALI	181.000,-
25	PAJARAKAN	KABUPATEN SITUBONDO	ORANG/KALI	210.000,-
26	PAJARAKAN	KABUPATEN SUMENEP	ORANG/KALI	255.000,-
27	PAJARAKAN	KABUPATEN TRENGGALEK	ORANG/KALI	245.000,-
28	PAJARAKAN	KABUPATEN TUBAN	ORANG/KALI	245.500,-
29	PAJARAKAN	KABUPATEN TULUNGAGUNG	ORANG/KALI	245.000,-
30	PAJARAKAN	KOTA BATU	ORANG/KALI	241.000,-
31	PAJARAKAN	KOTA BLITAR	ORANG/KALI	255.000,-
32	PAJARAKAN	KOTA BOJONEGORO	ORANG/KALI	225.000,-
33	PAJARAKAN	KOTA KEDIRI	ORANG/KALI	235.000,-
34	PAJARAKAN	KOTA MOJOKERTO	ORANG/KALI	191.500,-
35	PAJARAKAN	KOTA PROBOLINGGO	ORANG/KALI	42.000,-
36	PAJARAKAN	KOTA MALANG	ORANG/KALI	228.000,-

TABEL 3.10  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA TENGAH (ONE WAY/SEKALI JALAN)

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	PAJARAKAN	YOGJAKARTA	ORANG/KALI	800.000,-
2	PAJARAKAN	SLEMAN	ORANG/KALI	800.000,-
3	PAJARAKAN	KULON PROGO	ORANG/KALI	800.000,-
4	PAJARAKAN	BANTUL	ORANG/KALI	800.000,-
5	PAJARAKAN	GUNUNG KIDUL	ORANG/KALI	700.000,-
6	PAJARAKAN	SOLO	ORANG/KALI	700.000,-
7	PAJARAKAN	KLATEN	ORANG/KALI	700.000,-
8	PAJARAKAN	SRAGEN	ORANG/KALI	600.000,-
9	PAJARAKAN	KARANGANYAR	ORANG/KALI	700.000,-
10	PAJARAKAN	SUKOHARJO	ORANG/KALI	700.000,-
11	PAJARAKAN	WONOGIRI	ORANG/KALI	700.000,-
12	PAJARAKAN	BOYOLALI	ORANG/KALI	700.000,-
13	PAJARAKAN	SEMARANG	ORANG/KALI	800.000,-
14	PAJARAKAN	SALATIGA	ORANG/KALI	800.000,-
15	PAJARAKAN	KENDAL	ORANG/KALI	900.000,-
16	PAJARAKAN	MAGELANG	ORANG/KALI	800.000,-

TABEL 3.11  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI BALI (ONE WAY/SEKALI JALAN)

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	PAJARAKAN	DENPASAR	ORANG/KALI	450.000,-
2	PAJARAKAN	GIANYAR	ORANG/KALI	450.000,-
3	PAJARAKAN	BADUNG	ORANG/KALI	400.000,-

Catatan :

- Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam satu wilayah Provinsi, termasuk untuk biaya tol dan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Satuan biaya taksi transportasi darat dari Kabupaten/Kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama hanya berlaku untuk Pimpinan/Anggota DPRD yang dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

## 8. Satuan Biaya Telepon

Satuan biaya telepon merupakan satuan biaya komunikasi bagi pejabat karena kedudukan dan kewenangannya dalam rangka menunjang/mendukung kelancaran tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses semua informasi. Biaya telepon (pasca bayar) dianggarkan tidak lebih dari 2 (dua) nomor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan penganggarannya pada belanja program kegiatan di Bagian Umum untuk Bupati beserta ajudannya, Wakil Bupati beserta ajudannya. Di Sekretariat DPRD untuk Pimpinan dan anggota DPRD. Biaya telepon pembayarannya secara *at cost*.

TABEL 3.12  
SATUAN BIAYA TELEPON

NO	URAIAN	SATUAN BIAYA
1	Bupati	Rp. 400.000
2	Wakil Bupati	Rp. 400.000
3	Pimpinan DPRD	Rp. 400.000
4	Anggota DPRD	Rp. 400.000
5	Ajudan Bupati	Rp. 200.000
6	Ajudan Wakil Bupati	Rp. 200.000
7	Ajudan Pimpinan DPRD	Rp. 200.000

## Keterangan:

- OJ : Orang/Jam  
 OH : Orang/Hari  
 OB : Orang/Bulan  
 OT : Orang/Tahun  
 OP : Orang/Paket  
 OK : Orang/Kegiatan  
 OR : Orang/Responden  
 Oter : Orang/Terbitan  
 OJP : Orang/Jam Pelajar

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO